

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Ninda Kurnia Dewi

Universitas Negeri Yogyakarta
nindakurnia.2018@student.uny.ac.id

Dhyah Setyorini

Universitas Negeri Yogyakarta
dhyah_setyorini@uny.ac.id

Abstrak: Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dalam perspektif keuangan dan perspektif non keuangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Perspektif keuangan untuk menilai kinerja berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan melalui perspektif non keuangan dinilai melalui aspek kualitas pelayanan, kepuasan publik, dan responsivitas. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tingkat ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dalam kategori cukup ekonomis ditunjukkan pada 95,11%. 2) Tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dalam kategori kurang efisien ditunjukkan pada 99,30%. 3) Tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dalam kategori kurang efektif ditunjukkan pada 71,15%. 4) Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 pada aspek kualitas pelayanan cenderung tinggi. Kualitas pelayanan dalam penyaluran bantuan dinilai masih belum memuaskan. 5) Kecenderungan kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 pada aspek kepuasan publik berkategori sedang. Indikator ketersediaan ventilator di Kabupaten Bantul masih belum mencukupi. 6) Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 pada indikator aspek responsivitas berkategori sedang. Indikator respon keluhan masyarakat pemerintah Kabupaten Bantul dinilai paling rendah.

Kata kunci: Kinerja Penanganan COVID-19, *Value For Money*, Organisasi Sektor Publik

Abstract: Financial Performance Analysis Of The Government Of Bantul Regency In Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) This study aims to determine the results of measuring the performance of the Bantul Regency Government in dealing with COVID-19 from a financial perspective and a non-financial perspective. The type of research conducted is descriptive quantitative research. The financial perspective to assess performance is based on the concept of *value for money* which consists of three main elements, namely economy, efficiency, and effectiveness. Meanwhile, from a non-financial perspective, it is assessed through aspects of service quality, public satisfaction, and responsiveness. Data collection methods used are documentation and questionnaires. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that 1) The economic level of the Bantul Regency Government's financial performance in dealing with COVID-19 in the quite economical category is shown at 95.11%. 2) The efficiency level of the Bantul Regency Government's financial performance in dealing with COVID-19 in the less efficient category is shown at 99.30%. 3) The level of effectiveness of the Bantul Regency Government's financial performance in dealing with COVID-19 in the less effective category is shown at 71.15%. 4) The performance of the Bantul Regency Government in dealing with COVID-19 in terms of service quality tends to be high. The quality of service in the distribution of aid is still considered unsatisfactory. 5) The trend of the Bantul Regency Government's performance in dealing with COVID-19 in the aspect of public satisfaction is in the medium category. The indicator of the availability of ventilators in Bantul Regency is still not sufficient. 6) The performance of the Bantul Regency Government in dealing with

COVID-19 on the indicators of the responsiveness aspect is in the medium category. The indicators for responding to complaints from the Bantul Regency government are considered the lowest.

Keywords: *Performance Handling COVID-19, Value For Money, Public Sector Organizations*

PENDAHULUAN

Wabah COVID-19 telah menyebar dan berdampak pada berbagai sektor termasuk perekonomian global. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia terdeteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 (Liputan6.com, 2021). Pandemi COVID-19 merupakan masalah global yang mengharuskan setiap negara bergerak cepat untuk menerapkan langkah-langkah efektif supaya terhindar dari krisis pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya maupun politik. Setiap negara memiliki respons yang berbeda dalam menghadapi pandemi COVID-19, hal ini juga menentukan keberhasilan dalam menangani pandemi di negaranya. Untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi untuk meredam dampak negatif di bidang ekonomi sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi. Sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 pemerintah telah menerbitkan instrumen hukum seperti Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020

tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Pada tanggal 13 April 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 (Kementerian Luar Negeri, 2020).

Sejumlah upaya perbaikan juga dilakukan untuk memperkuat ekonomi nasional dan untuk menghadapi krisis saat pandemi COVID-19. Salah satunya mengeluarkan paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahun 2020 sebesar Rp695,23 triliun untuk belanja penanganan COVID-19 dalam program PEN (Purwanto, 2021). Rinciannya adalah kluster perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, kesehatan sebesar Rp87,55 triliun,

Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sebesar Rp106,11 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, dukungan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun, dan pembiayaan korporasi sebesar Rp53,60 triliun (Purwanto, 2021). Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ditujukan kepada seluruh lembaga, kementerian dan Pemerintah Daerah yang berfokus di bidang kesehatan, bantuan sosial, serta perlindungan di bidang ekonomi atau usaha.

Alokasi dana yang cukup fantastis dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 namun muncul permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yaitu penyerapan anggaran yang rendah terjadi di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun tingkat daerah. Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun dan melonjak di akhir tahun menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Suwarni & Maruf, 2018). Terlambatnya realisasi anggaran yang terjadi di akhir tahun berimplikasi terhadap kinerja pemerintah (Ulandari *et al.*, 2021). Masalah ini menghambat proyek-proyek yang sedang berjalan dalam penanganan COVID-19 di daerah tersebut. Total anggaran biaya

penanganan pandemi COVID-19 melalui program PEN tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun (Puspasari, 2021). Pada 18 Juni 2021 Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran PEN mencapai Rp226,63 triliun, atau baru 32,4 persen dari total pagu (Puspasari, 2021). Anggaran PEN dalam kluster kesehatan baru terealisasi sebesar Rp39,55 triliun atau serapan dana anggaran baru mencapai 22,9 persen (Ulya, 2021).

Di tingkat daerah realisasi anggaran COVID-19 DIY baru terserap sebesar 13% pada bulan Januari hingga Mei 2021 (Edi, 2021). Padahal Pemda DIY telah mengalokasikan dana sebesar Rp242 miliar untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Ketua DPRD DIY menuturkan serapan anggaran yang masih kecil menjadi indikasi belum maksimalnya kebijakan strategis Pemda DIY dalam penanganan COVID-19 (Edi, 2021). Khususnya di Kabupaten Bantul pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum tepat waktu sesuai rencana sehingga banyak menumpuk di akhir tahun (LKPI, 2020). Kabupaten Bantul memberikan bantuan sosial berupa uang kepada keluarga terdampak COVID-19 sudah didukung Keputusan Bupati Bantul Nomor 302 Tahun 2020. Namun berdasarkan hasil mini survey menunjukkan pemberian bantuan sosial saat menjalani isolasi mandiri di rumah menjadi indikator terendah pada kategori cukup baik. Padahal Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 telah

memberikan izin penggunaan dana belanja tidak terduga sebesar Rp4.411.200.000,00. Adanya tambahan alokasi dana seharusnya diiringi dengan keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menangani COVID-19.

Ukuran keberhasilan yang dicapai organisasi publik sebagai tolok ukur kinerja organisasi tersebut. Upaya pemerintah daerah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 perlu dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah bagian dari proses pengelolaan untuk menentukan kualitas dan keberhasilan dari program kegiatan (Elbana, 2013). Berdasarkan perkembangan data kasus konfirmasi positif COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat secara signifikan pada minggu kedua bulan Juni 2021 (BPBD DIY, 2021), dimana kenaikannya mencapai 30% dan terus meningkat pada minggu berikutnya. Berdasarkan data dari Pemda DIY, Kabupaten Bantul menjadi penyumbang tertinggi kasus positif dan kasus meninggal di antara kabupaten lainnya (Susanto, 2021). Berdasarkan survei indikator Politik Indonesia (2020) masih terdapat 1,9 persen responden tidak puas sama sekali sebesar dan 24 persen menyatakan kurang puas terhadap kinerja GTPP COVID-19. Untuk itu penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah khususnya Kabupaten Bantul sebagai organisasi publik dalam menangani COVID-19. Pengukuran kinerja organisasi sektor

publik menurut Levine et al (1990) memiliki lima indikator meliputi kualitas pelayanan, responsivitas, produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian (Wijaya, 2020) aspek yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu responsivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas, untuk itu dalam penelitian ini menggunakan aspek responsivitas dan kualitas pelayanan, sedangkan aspek akuntabilitas tidak digunakan karena menggunakan data sekunder. Adapun penelitian ini juga menggunakan aspek kepuasan publik untuk mengukur kinerja sektor publik berdasarkan Mardiasmo (2018). Untuk itu penelitian ini dalam mengukur kinerja penanganan COVID-19 dapat dilihat dari aspek kualitas pelayanan, kepuasan publik, dan aspek responsivitas.

Setiap organisasi publik yang memberikan layanan publik harus memperhatikan kualitas pelayanan. Kebijakan pemerintah daerah untuk menghadapi penyebaran COVID-19 tentunya akan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Meskipun di masa pandemi COVID-19, pelayanan publik harus tetap dilaksanakan tentunya dengan dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan mengubah atau memangkas mekanisme layanan. Namun faktanya sejumlah masyarakat masih

mengeluh terkait buruknya layanan terutama layanan bantuan sosial dan sembako (Pasifika, 2020). Terkait pelayanan fasilitas kesehatan yang diberikan, keterbukaan informasi, dan keakuratan data pasien di sejumlah daerah juga masih dipertanyakan (Wijaya, 2020). Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan, 38% dari total responden menunjukkan tingkat kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dinilai tidak baik dan cukup baik.

Kepuasan publik akan terwujud apabila kualitas pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan (Suandi, 2019). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Median, tingkat kepuasan terhadap penanganan COVID-19 menyatakan tidak puas sebesar 30,6 persen (CNN Indonesia, 2021a). Berdasarkan survei Spektrum Politika Institus (SPI) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19 sebesar 57,8 persen (CNN Indonesia, 2021b). Tingkat kepuasan publik terhadap program Kartu Prakerja rendah, pemberian sanksi untuk pelanggaran protokol kesehatan juga belum ada ketegasan, serta pemulihan ekonomi juga masih rendah (Rochim, 2020).

Responsivitas sebagai salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan program-program pelayanan. Responsivitas

adalah kemampuan organisasi untuk untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kemala Novriyanti et al., 2020). Organisasi yang memiliki responsivitas rendah memiliki kinerja yang kurang maksimal (Agus Dwiyanto, 2006). Responsivitas yang rendah juga menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat (Kemala Novriyanti et al., 2020). Berdasarkan data mini survey, 42% dari total responden menunjukkan responsivitas pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dinilai tidak baik dan cukup baik. Kedua narasumber menilai kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani pandemi COVID-19 memilih skala tidak baik. Dari aspek responsivitas/kepekaan pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 juga dinilai tidak baik. Alasannya karena dilihat dari sisi vaksinasi COVID-19 yang belum semasiv di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, penelitian masih perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam menangani virus COVID-19. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten

Bantul dalam Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*". Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul beserta upaya memperbaiki kinerja di tengah pandemi yang masih dihadapi Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Agency Theory

Menurut Jensen dan Mecking (1976) keagenan adalah suatu kontrak antara *principal* dan agen untuk mendelegasikan beberapa wewenang dalam pengambilan keputusan. Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara *principal* atau pemilik dengan manajemen sebagai *agent* untuk menjalankan kepetingan yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang.

Kinerja Sektor Publik

Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan atau program yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah serangkaian sistem yang bertujuan membantu manajemen publik mengambil keputusan melalui informasi non keuangan dan informasi keuangan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

program yang telah ditetapkan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara keseluruhan (Mardiasmo, 2018). Hal ini dikarenakan output organisasi sektor publik bersifat *intangibile output*, sehingga ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Maka dari itu perlu dikembangkan ukuran kinerja nonfinansial. Ukuran kinerja bertujuan dapat membantu pemerintah agar mencapai tujuan sehingga dapat meningkatkan ekonomis, efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2018) indikator kinerja *value for money* terdiri dari tiga elemen utama, diantaranya adalah

a. Ekonomi

Ekonomi adalah pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*) (Mardiasmo, 2018). Dengan kata lain, ekonomi merupakan perolehan input barang dan jasa dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Secara matematis ekonomi dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

b. Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu (Mardiasmo, 2018). Efisiensi menunjukkan hubungan antara input sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

$$Efisiensi = \frac{Realisasi Pengeluaran}{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

c. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan pencapaian hasil atau target yang harus dicapai. Program kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) (Mardiasmo, 2018). Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pendapatan}{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$$

Dikemukakan oleh Levine et al. (1990) bahwa untuk mengukur kinerja pelayanan publik menggunakan lima indikator sebagai berikut.

a. Produktivitas

Produktivitas adalah rasio antara input dan output yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi namun juga efektivitas pelayanan (A Dwiyanto, 1995). Konsep produktivitas terlalu sempit sehingga *General Accounting Office* (GAO) mengembangkan ukuran

produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah ukuran pandangan masyarakat untuk puas atau tidak puas mengenai pelayanan yang diberikan (Wijaya, 2020). Menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan publik adalah suatu keadaan yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penelitian kualitas ditentukan saat proses pelayanan publik diberikan.

c. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (A Dwiyanto, 1995). Responsivitas menunjukkan adanya keselarasan antara program dan kegiatan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan ukuran yang menunjukkan proses pelayanan publik dijalankan tanpa melanggar

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (Hardiyansyah, 2018).

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan dengan ukuran eksternal yang ada di masyarakat seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (Hardiyansyah, 2018). Konsep akuntabilitas publik digunakan untuk menilai penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan organisasi publik dapat konsisten dengan kehendak masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018) penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen sebagai berikut:

a. Biaya pelayanan (*cost of service*);

Indikator biaya pelayanan diukur dalam bentuk biaya per unit pelayanan, namun beberapa pelayanan dimungkinkan tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat diukur atau dikuantifikasikan.

b. Penggunaan (*utilization*);

Indikator penggunaan (*utilization*) merupakan perbandingan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan pelayanan publik (*public demand*). Pengukuran penggunaan (*utilization*) bisa berupa

volume absolut atau presentase tertentu seperti presentase penggunaan kapasitas, sedangkan indikator penggunaan (*utilization*) harus mempertimbangkan preferensi publik.

c. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*);

Indikator kualitas dan standar pelayanan sulit diukur karena terkait dengan pertimbangan yang bersifat subyektif. Indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilaksanakan secara hati-hati dikarenakan jika terlalu menekankan indikator ini dapat menimbulkan kontra produktif.

d. Cakupan pelayanan (*coverage*);

Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

e. Kepuasan (*satisfaction*).

Indikator kepuasan diukur menggunakan metode jajak pendapat secara langsung.

Definisi operasional kepuasan masyarakat berdasarkan prinsip unsur indeks pelayanan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, yang mengatur sembilan unsur minimal yang

harus ada untuk dasar pengukuran indeks survey kepuasan masyarakat sebagai berikut:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persyaratan baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur adalah tahapan pelayanan yang harus dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan layanan.
3. Waktu adalah jangka waktu yang diperlukan dalam penyelesaian proses layanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif adalah harga yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.
5. Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan.
6. Kompetensi petugas adalah kemampuan yang harus dimiliki petugas meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku petugas adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah

segala sesuatu sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu usaha.

Menurut Parasuraman et al. (1988) pengukuran kualitas pelayanan publik dibagi menjadi lima indikator antara lain

1. *Tangibles* adalah fasilitas fisik, fasilitas komunikasi, peralatan, dan pegawai yang dimiliki oleh penyedia layanan.
2. *Reliability* adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. Responsivitas adalah kerelaan dan keikhlasan penyedia layanan dalam menyelenggarakan pelayanan.
4. *Assurance* adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para petugas dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pengguna layanan.
5. *Empathy* adalah perhatian penyedia layanan dalam memberikan pelayanan.

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merancang prioritas kebutuhan, dan menyusun ke dalam berbagai program kegiatan (Dwiyanto, 2005). Terdapat lima indikator pengukuran responsivitas menurut Agus Dwiyanto (2006) sebagai berikut.

1. Keluhan pengguna jasa
2. Sikap aparat birokrasi merespon keluhan
3. Manfaat keluhan sebagai referensi perbaikan pelayanan

4. Tindakan aparat birokrasi dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat
5. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek dan subyek yang diteliti untuk memberikan gambaran fakta dan karakteristik secara sistematis dan tepat (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Adapun metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode kuantitatif dilakukan melalui pengukuran data kuantitatif dan perhitungan ilmiah berasal dari sejumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden untuk mengetahui persentase tanggapan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini melibatkan masyarakat Kabupaten Bantul sebagai responden penelitian. Waktu pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan November sampai Desember 2021 untuk membagikan kuesioner, pengumpulan data,

analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data non keuangan berupa data responden yang dikumpulkan melalui kuesioner. Adapun data sekunder berupa data keuangan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Program Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul tahun 2020, dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantul tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk data keuangan adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data yang didapat dari metode penelitian ini adalah laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran Program Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul tahun 2020, dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantul tahun 2020.

Adapun teknik pengumpulan data pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data non keuangan adalah

kuesioner. Menurut Sugiyono (2013:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data untuk memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab seperangkat pertanyaan tertulis. Responden penelitian ini terdiri dari masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuesioner diberikan kepada responden secara elektronik maupun secara pribadi.

Obyek dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19. Penilaian kinerja menggunakan aspek keuangan dalam mengelola keuangan dan aspek non keuangan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Adapun obyek penelitian adalah laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran Program Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul tahun 2020, dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantul tahun 2020.

Subyek Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling incidental, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menyebarkan kuesioner dengan siapa saja yang bertemu dengan peneliti (kebetulan)

yang tentunya dalam lingkup populasinya dan pada kriteria tertentu.

Adapun subyek penelitian untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan aspek non keuangan adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis mempersempit subyek penelitian yaitu jumlah masyarakat Kabupaten Bantul sebanyak 954.706 jiwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul semester 2 tahun (2020) dengan menghitung sampel penelitian menggunakan teknik Slovin. Untuk menentukan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir

Berikut perhitungan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut.

$$n = \frac{954.706}{1 + 954.706 (10)^2}$$

$$n = \frac{954.706}{9548}$$

n = 99,99 dibulatkan menjadi 100 responden.

Bentuk instrumen yang digunakan yaitu angket berisi pertanyaan-pertanyaan berupa skala likert. Masing-masing butir pernyataan penelitian di dalam kuesioner diberi skor yang diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Setelah data terkumpul dilakukan uji coba instrument menggunakan uji coba terpakai, yaitu instrumen diuji secara langsung pada sampel dan digunakan sebagai data penelitian. Hasilnya menunjukkan semua item pertanyaan variabel kualitas pelayanan, kepuasan publik, dan responsivitas seluruhnya dinyatakan valid, sehingga seluruhnya dapat digunakan dalam penelitian. Adapun hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha setiap variabel lebih besar dari 0.60, sehingga seluruh jawaban responden dapat digunakan.

Teknik analisis data keuangan

Data keuangan pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Untuk mengukur kinerja menggunakan pengukuran pada konsep *value for money* yang dikembangkan Mardiasmo (2002) adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran.

Pengukuran ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

$$Ekonomi = \frac{Realisasi\ Pengeluaran}{Anggaran\ Pengeluaran} \times 100\%$$

b. Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Pengukuran efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Pengeluaran}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

c. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan pencapaian tujuan atau target yang harus dicapai. Program kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Pengukuran efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$$

Teknik analisis data non keuangan

Teknik analisis data non keuangan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis data pada penelitian kuantitatif merupakan hasil pengolahan data atas jawaban responden pada setiap item pernyataan kuesioner. Analisis statistic deskriptif meliputi nilai

mean, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Seluruh data yang terkumpul dilakukan pengelompokan data berdasarkan setiap variabel yang diteliti, dan dilakukan perhitungan batas kelas interval dan kriteria penilaian. Statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi. Menurut Sugiyono (2007: 36) langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

a) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Perhitungan jumlah kelas interval dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

$$\text{Kelas interval} = 1 + 3,3 \text{ Log } n$$

b) Menghitung Rentang Data

$$\text{Rentang data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum})$$

c) Menghitung Panjang Kelas

$$\text{Panjang Kelas} = \frac{\text{Rentang Data}}{\text{Jumlah Kelas Interval}}$$

Selanjutnya untuk menentukan kategori kecenderungan variabel dihitung berdasarkan Mean Ideal (M_i) dan Standar Deviasi Ideal (SD_i). Untuk menghitung Mean Ideal (M_i) dan Standar Deviasi Ideal (SD_i) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$M_i = \frac{1}{2} (\text{Nilai tertinggi} + \text{Nilai Terendah})$$

$$SD_i = \frac{1}{6} (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai Terendah})$$

Kemudian untuk mengidentifikasi pengkategorian normal dihitung dengan rumus :

$$\text{Tinggi} = X > [M_{i+1}(SD_i)]$$

$$\text{Sedang} = [M_i - 1(SD_i) \leq X \leq [M_{i+1}(SD_i)]$$

$$\text{Rendah} = X < [M_{i-1}(SD_i)]$$

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil data yang telah diolah sehingga memperoleh hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori keagenan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Bantul oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri dari *principal* dan agen. *Principal* dari kebijakan ini adalah pemerintah pusat yang memberikan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sedangkan agen dari kebijakan ini adalah Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dalam perspektif keuangan dan perspektif non keuangan. Perspektif keuangan untuk menilai kinerja berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan melalui perspektif non keuangan dinilai melalui

aspek kualitas pelayanan, kepuasan publik, dan responsivitas.

Metode *value for money* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. *Value for money* tidak hanya berguna untuk mengukur biaya barang dan jasa namun juga memasukkan unsur-unsur kualitas biaya, sumber daya yang digunakan, ketetapan penggunaan, batasan waktu, kemudahan dalam menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur tersebut membentuk suatu *value* atau nilai yang baik (Khalikussabir, 2017). Hal ini diperkuat dengan statement Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2019) yang menyatakan bahwa *value for money* sebagai review dalam pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban negara melalui pemerintah daerah kepada pembayar pajak, pendonor, dan pemberi hibah.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menangani COVID-19 Dalam Aspek Ekonomi

Pengukuran ekonomi bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 untuk memperoleh dan mengelola sumber daya supaya dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Tingkat ekonomis

suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, namun juga harus mempertimbangkan output yang dihasilkan. Penghematan menjadi berkurang maknanya jika keluaran yang dihasilkan tidak sesuai target atau tidak dapat tercapai secara maksimal.

Tabel Pengukuran Ekonomi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tahun 2020

Keterangan	Tahun 2020
Pengukuran Ekonomi	95,11%
Kriteria Ekonomi	Cukup Ekonomis

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis data atas pengukuran ekonomi terhadap program kerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 diketahui bahwa telah memenuhi elemen ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang disediakan tiap tahunnya, tidak habis terpakai dalam memenuhi seluruh program kerja setiap tahunnya, dengan nilai rata-rata output yang dihasilkan hampir mencapai maksimal, yaitu sebesar 95,11%. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani pandemi COVID-19 dengan tiga prioritas yaitu kesehatan, dampak ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial. Pada tahun 2020 dana sejumlah Rp106.051.907.158 yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan untuk menangani COVID-19.

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menangani COVID-19 Dalam Aspek Efisiensi

Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dengan menggunakan sumber daya (input) yang tersedia untuk menghasilkan keluaran (output). Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian dari pengukuran efisiensi berdasarkan program kerja yang diteliti.

Tabel Pengukuran Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tahun 2020

Keterangan	Tahun 2020
Tingkat Efisiensi	99,30%
Kriteria Efisiensi	Kurang Efisien

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis data pengukuran efisiensi pada program kerja periode tahun 2020 diketahui bahwa untuk periode tersebut dapat dikatakan kurang efisien. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 masih harus meminimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam hal ini anggaran yang digunakan hampir maksimal yaitu 99,06% dari total anggaran yang disediakan, dan output yang dihasilkan tidak mencapai 100%

yaitu 95,11% sehingga menghasilkan nilai rata-rata pengukuran efisiensi sebesar 96,01%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini dalam setiap menjalankan kegiatannya belum menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan dan belum bisa menghemat penggunaan sumber daya (input) yang dalam hal ini adalah anggaran.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menangani COVID-19 Dalam Aspek Efektivitas

Berdasarkan hasil analisis data pengukuran efektivitas pada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 periode tahun 2020 diketahui bahwa untuk periode tahun 2020 program ini kurang efektif. Pengukuran efektivitas yang dihasilkan program ini pada periode tahun 2020 yaitu 95,11%.

Tabel Pengukuran Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tahun 2020

Keterangan	Tahun 2020
Tingkat Efektivitas	71,15%
Kriteria Efektivitas	Kurang Efektif

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2022

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 periode tahun 2020 kurang efektif karena adanya satu kegiatan yang capaian kinerjanya kurang maksimal, sehingga membuat rata-rata pengukuran efektivitas program ini belum

mencapai target yang diharapkan. Kegiatan Dampak Ekonomi dan Kesehatan hanya mampu menghasilkan capaian kinerja 93,44% dan 93,94% dari yang ditargetkan sehingga juga membuat pengukuran efektivitas yang dihasilkan hanya 95,11%. Artinya kegiatan tersebut belum mencapai tujuan atau target kebijakan yang telah ditetapkan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menangani COVID-19 Dinilai Dari Aspek Kualitas Pelayanan

Untuk mengetahui kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19, peneliti memilih menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk 1990 yaitu *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy*.

Berdasarkan penilaian dari 100 responden kecenderungan penilaian pada aspek kualitas pelayanan yaitu berkategori tinggi. Artinya penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 pada aspek kualitas pelayanan sudah baik secara maksimal. Penilaian tertinggi responden pada aspek kualitas pelayanan adalah pada sub indikator “Pemerintah Kabupaten Bantul mampu melaksanakan program vaksinasi COVID-19 di setiap wilayah”. Sedangkan penilaian terendah responden pada aspek kualitas

pelayanan pada sub indikator “Pemerintah Kabupaten Bantul mampu memberikan bantuan secara merata untuk masyarakat”. Bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam program Jaring Pengaman Sosial berupa uang tunai ataupun beras. Pemberian bantuan sosial didistribusikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat terdampak COVID-19.

Dalam indikator pemberian bantuan kepada masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Bantul masih belum merata. Artinya kualitas pelayanan dalam penyaluran bantuan dinilai masih belum memuaskan. Dalam penyaluran bantuan muncul permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan yaitu warga yang berhak menerima bantuan namun tidak terdata dan warga yang sudah meninggal dunia namun tercatat sebagai penerima bantuan (Ratna Sari Dewi, 2020). Permasalahan dalam penyaluran bantuan di tingkat daerah adalah (1) data penerima bantuan yang tidak update sementara bantuan harus segera di salurkan, (2) data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih dengan bantuan lainnya, (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperoleh dari pihak RT/RW tidak terinput data terbaru warga terdampak COVID-19, (4) kurangnya kesadaran penerima bantuan yang sudah mengalami

perubahan ekonomi untuk melaporkan kepada pihak RT/RW, (5) Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait jenis bantuan sosial. Penyebab terhambatnya kinerja kegiatan updating data DTKS karena adanya pembatasan pengumpulan orang dan diharuskan menghindari tatap muka untuk menghindari penyebaran COVID-19 (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2020).

Pemerintah Kabupaten Bantul telah memberikan bantuan sosial untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 pada tahun 2020 dalam beberapa tahap. Rekapitulasi pemberian bantuan sosial berupa uang kepada keluarga terdampak COVID-19. Total realisasi anggaran untuk penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada keluarga terdampak COVID-19 sebesar Rp20.771.400.000 dengan jumlah penerima sebanyak 42.391 KPM. Sementara masyarakat Kabupaten Bantul yang termasuk ekonomi bawah berjumlah 405.613 orang pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2020). Sehingga baru 10,45% masyarakat ekonomi bawah yang sudah menerima bantuan sosial untuk keluarga terdampak COVID-19 yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menangani COVID-19 Dinilai Dari Aspek Kepuasan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak sipil setiap warga negara atas suatu barang, jasa, dan pelayanan yang disediakan penyelenggara pelayanan publik (Hidayah, 2020). Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik. Berdasarkan penilaian dari 100 responden kecenderungan penilaian pada aspek Kepuasan Publik yaitu berkategori sedang. Artinya penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 pada aspek kepuasan publik belum baik secara maksimal. Penilaian tertinggi responden pada aspek Kepuasan Publik adalah pada sub indikator “Pemerintah Kabupaten Bantul bersikap ramah saat memberikan pelayanan”. Sedangkan penilaian terendah responden pada aspek Kepuasan Publik pada sub indikator “Ketersediaan ventilator di Kabupaten Bantul cukup memadai”. Permasalahan terkait dengan kebutuhan di Bidang Kesehatan dikarenakan anggaran untuk memenuhi target masih kurang terutama untuk pembelian Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan reagen untuk pemeriksaan (Kabupaten Bantul, 2020). Selain itu yang menjadi kendala adalah proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang lama, serta kenaikan kasus positif COVID-19 yang meningkat secara signifikan berdampak pada

jumlah persediaan yang tidak mampu mengimbangi kebutuhan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menangani COVID-19 Dinilai Dari Aspek Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam memahami kebutuhan masyarakat yang kemudian disusun sebagai agenda yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat (Sedarmayanti, 2004). Responsivitas menunjukkan keselarasan antara program kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat (Tangkilisan, 2005). Responsivitas dalam konteks penelitian ini yaitu berkaitan dengan daya tanggap Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memahami dan menanggapi keinginan serta kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan penilaian dari 100 responden kecenderungan penilaian pada aspek responsivitas yaitu berkategori sedang. Artinya penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 pada aspek responsivitas belum baik secara maksimal. Penilaian tertinggi responden pada aspek responsivitas adalah pada sub indikator “Pemerintah Kabupaten Bantul siap memberikan pelayanan pada saat dibutuhkan oleh masyarakat”. Sedangkan penilaian terendah responden pada aspek responsivitas pada sub indikator “Pemerintah

Kabupaten Bantul merespon keluhan masyarakat dengan cepat”.

Layanan hotline terkait COVID-19 di Kabupaten Bantul dengan nomor 119 atau 112, adapun website yang digunakan untuk menginformasikan COVID-19 melalui corona.bantulkab.go.id. Serta Lapor Bantul merupakan media aduan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan di wilayah Kabupaten Bantul. Lapor Bantul digunakan untuk penyampaian laporan berbentuk pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. Namun berdasarkan survey yang dilakukan dari 100 responden menunjukkan respon keluhan masyarakat pemerintah Kabupaten Bantul dinilai paling rendah. Berdasarkan laporan layanan informasi menunjukkan waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik antara 1 sampai 3 hari. Adapun kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik (PPID Kabupaten Bantul, 2020) adalah pertama Badan publik belum siap untuk membuka akses seluas-luasnya terkait informasi publik dengan mekanisme akses yang cepat, mudah, murah, dan sederhana. Kedua penyelenggaraan informasi publik belum dijadikan sebagai prioritas dalam pelayanan publik. Ketiga fokus aktivitas kerja pada terselenggaranya

kegiatan dan outputnya. Keempat belum terinventarisnya seluruh data informasi publik. Keempat Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap. Kelima terbatasnya sumber daya manusia yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 pada aspek kualitas pelayanan cenderung tinggi sehingga kinerja sudah baik secara maksimal. Dalam indikator pemberian bantuan kepada masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Bantul masih belum merata. Artinya kualitas pelayanan dalam penyaluran bantuan dinilai masih belum memuaskan.
2. Kecenderungan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 pada aspek kepuasan publik berkategori sedang. Dalam aspek kepuasan publik menunjukkan indikator ketersediaan ventilator di Kabupaten Bantul masih belum mencukupi.
3. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 pada indikator aspek responsivitas berkategori sedang. Indikator respon keluhan

masyarakat pemerintah Kabupaten Bantul dinilai paling rendah.

4. Tingkat ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dalam kategori cukup ekonomis karena berada pada pengukuran 95,11%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran dalam menangani COVID-19 sudah direalisasikan seminimal mungkin.
5. Tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dalam kategori kurang efisien karena berada pada pengukuran 99,30%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran dalam menangani COVID-19 belum memenuhi syarat efisien karena belum menggunakan dana seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimum.
6. Tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani COVID-19 dalam kategori kurang efektif karena berada pada pengukuran 71,15%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam realisasi program/kegiatan dalam menangani COVID-19 belum terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Saran

1. Berdasarkan aspek kualitas pelayanan, sebaiknya setiap tahun data penerima bantuan dilakukan update dan verifikasi

- data meskipun dalam kondisi terjadi bencana maupun tidak. Namun untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan seperti dalam kondisi pandemi COVID-19 pemerintah dapat siap dengan data siapa saja yang harus diberikan bantuan sosial.
2. Berdasarkan aspek kepuasan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul harus lebih cepat tanggap dalam menangani COVID-19, dengan cara segera mempersiapkan sarana prasarana dan penyediaan logistik kesehatan apabila sudah ada tanda-tanda trend COVID-19 naik.
 3. Berdasarkan aspek responsivitas, Pemerintah Kabupaten Bantul harus lebih mengoptimalkan penggunaan HP untuk melayani secara online dengan memaksimalkan media sosial seperti Whatsapp supaya dapat memberikan pelayanan secara maksimal dan dapat merespon masyarakat secara cepat.
 4. Berdasarkan aspek ekonomi, Pemerintah Kabupaten Bantul harus melakukan penghematan anggaran untuk menghindari pengeluaran yang tidak produktif dengan cara mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan dalam melaksanakan program kegiatan penanganan COVID-19.
 5. Berdasarkan aspek efisiensi, Pemerintah Kabupaten Bantul harus lebih memperhatikan perencanaan dan

pengendalian realisasi anggaran belanja penanganan COVID-19.

6. Berdasarkan aspek efektivitas, Pemerintah Kabupaten Bantul harus merealisasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 secara maksimal sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2020). *Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta 2018-2020*. Bantulkab.Bps.Go.Id. <https://bantulkab.bps.go.id/indicator/23/57/1/jumlah-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta.html>
- BPBD DIY. (2021). *Kasus Covid-19 Meningkat* (p. 9). [http://bpbdi.jogjapro.go.id/assets/public/Buletin Bulan JULI2021 07 Versi Web.pdf](http://bpbdi.jogjapro.go.id/assets/public/Buletin%20Bulan%20JULI2021%2007%20Versi%20Web.pdf)
- CNN Indonesia. (2021a). *Survei 30,6 Persen Netizen Tak Puas Penanganan Covid-19*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210707125535-192-664430/survei-306-persen-netizen-tak-puas-penanganan-covid-19>
- CNN Indonesia. (2021b). *Survei Kepuasan Warga ke Pemerintah Atasi Covid 57,8 Persen*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819165424-32-682577/survei-kepuasan-warga-ke-pemerintah-atasi-covid-578-persen>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. (2020). *Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul*. Pemerintah Kabupaten Bantul. https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000027/jumlah-penduduk.html#:~:text=Data

- Kependudukan,-Data Pokok&text=Kabupaten Bantul dengan luas wilayah,laki dan 478.835 jiwa perempuan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2019). *Implementasi Value For Money melalui Peningkatan Pelaksanaan Anggaran*.
- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Edi, P. (2021). *Ketua DPRD Ungkap Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 di DIY Masih Rendah*. Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-dprd-ungkap-penyerapan-anggaran-penanganan-covid-19-di-diy-masih-rendah.html>
- Kemala Novriyanti, Muh. Irfan Mufti, Shadiq, Muhammad Ahsan Samad, & Rudi Salam. (2020). Kinerja Organisasi Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 8.
<https://doi.org/10.52316/jap.v16i1.40>
- Kementerian Luar Negeri. (2020). *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19*.
<https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>
- Khalikussabir. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga dan PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo). *E-Jurnal Riset Manajemen*, 6(3), 446–481.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/446/481>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (ANDI (ed.)).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 4(1).
- Pasifika, M. (2020). *Mengawasi Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid-19*. Ombudsman.Go.Id.
<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengawasi-pelayanan-publik-di-masa-pandemi-covid-19>
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2020). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP) Kabupaten Bantul*.
- Purwanto, A. (2021). *Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Potret dan Strategi Pemulihan 2020-2021*. Kompaspedia.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paran-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021>
- Puspasari, R. (2021). *APBN Untuk Prioritas Penanganan Kesehatan Dan Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat*. Kementerian Keuangan.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-untuk-prioritas-penanganan-kesehatan-dan-perlindungan-kesejahteraan-masyarakat/>
- Rochim, A. (2020). *Survei Kepuasan Penanganan Corona, Publik Belum Puas Kinerja Pusat*. Koran Sindo.
<https://nasional.sindonews.com/read/98744/15/survei-kepuasan-penanganan-corona-publik-belum-puas-kinerja-pusat-1594577241?showpage=all>
- Suandi, S. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *Journal PPS UNISTI*, 1(2), 13–22.
<https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.8>
- Susanto, H. (2021). *Update Corona DIY 27 Juli Bantul Tertinggi Meninggal Rekor Selama Pandemi*. News.Detik.Com.
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5658976/update-corona-diy-27-juli-bantul-tertinggi-meninggal-rekor-selama-pandemi>

- Suwarni, D. E., & Maruf, M. F. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Surabaya (Studi Pada SKPD Dinas PU Bina Marga Dan Pematusan). *Publika*, 6(5), 1–7. <https://jurnal.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/23304>
- Ulandari, V., Akram, A., & Santoso, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Administrasi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1577. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p18>
- Ulya, F. N. (2021). *Hingga 18 Juni Realisasi PEN Capai 226,63 Triliun*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/06/21/195840626/hingga-18-juni-realisis-pen-capai-rp-22663-triliun>
- Wijaya, V. (2020). Evaluasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. *Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19*, 23. <https://covid19.go.id/>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). The Type of Descriptive Research in Communication Study. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>